GWR/27/4/1998

MASALAH PERTANAHAN
KRISIS MONETER
DAN CERITA ULAR DARI AFRIKA */

Oleh:

Gunawan Wiradi

PENGANTAR

1. Dalam suasana ketika hampir semua orang sedang hangat-hangatnya membicarakan masalah krisis moneter sekarang ini, pertanyaan yan segera muncul adalah: apakah masih relevan kita membahas masala pembaruan agraria ??

2. Dengan tujuan sekedar merangsang pertukaran pikiran, tulisan ini berisi usaha menjawab pertanyaan tersebut,tetapi hanya berupa u-raian sangat ringkas dalam bentuk butiran, dan dengan urutan te balik dari judul tersebut di atas.

I. CERITA ULAR DARI AFRIKA

1. Isi ceritanya :

> " Konon ada seekor ular yang sangat panjang ! Sangat, sangat panjangnya, sehingga ketika dia melilit-lilit pada sebuah pohon paling besar di Afrika, batang dan seluruh cabang pohon itu tak mampu memuat seluruh tubuhnya. Bagian belakangnya masih ketinggalan jauh di semak belukar. Ketika kepala ular itu sedang menggantung dan bergoyang-goyang di atas pohon tsb.,mendadak matanya terpukau oleh sebuah benda "aneh" dan "jelek", yang semakin lama dipandangnya semakin benci dia melihatnya, sehingga akhirnya diterkamlah benda itu.Namun, semakin cepat dia mengejar, semakin cepat pula benda tsb. lari menghindar. Kejar terus, tak pernah ketangkap. Akhirnya dia mati lemas,karena kelelahan. Pertanyaannya : 'Siapa yang mati, kepalanya ataukah ekornya' ?? ".
>
> (Disadur dari Szymon Chodak,1979:2)

---

*/ Bahan Diskusi. Disampaikan dalam 'Pertemuan Satu Hari' yang diselenggarakan oleh BPKPA, di Yogyakarta, 27 April 1998.

2. Apa makna sesungguhnya dari cerita itu, dan bagaimanakah jawaban atas pertanyaan tersebut ? Untuk waktu yang cukup lama saya tak mampu menjawabnya. Buku karya Prof. Chodak yang berjudul 'Societ Development' itu hanya mencantumkannya sebagai 'motto' dan tidak menjelaskan maknanya.

3. Kebetulan saja, tiga tahun setelah saya membaca buku tersebut, saya berkesempatan mengunjungi Afrika dan sempat berkeliling ke beberapa desa di Cameroon, Afrika Barat. Tentu, tidak semua orang tahu tentang cerita itu. Namun,kebetulan lagi,di salah satu desa, saya ketemu dengan seorang 'orang tua' yang memang mengenal cerita itu. Inilah jawabannya :

   a. Benda 'aneh' yang hendak diterkam oleh ular itu, tidak lain adalah ekornya sendiri !

   b. Jelas, dua-duanya mati. Tetapi, ekor itu mati setelah kepalanya mati.

   c. 'Wisdom' di balik cerita itu :

      Pertama: Suatu akibat, sebagai hasil dari suatu perbuatan salah yang dilakukan dalam waktu 'panjang', tak mungkin dihapus, apalagi dalam waktu cepat;

      Kedua: Barang siapa yang ingin menutup-nutupi kesalahannya sendiri, bahkan ingin menghapuskannya, dia akan mati secara tak terhormat.

4. Krisis hebat yang sekarang melanda Indonesia ini pada hakekatnya merupakan "ekor" dari strategi dasar kebijakan pembangunan Orde Baru, yaitu "Revolusi Hijau tanpa Reforma Agraria".

II. HUBUNGAN ANTARA KRISIS EKONOMI DAN MASALAH PERTANAHAN

1. Dalam pandangan saya,gejolak yang melanda Indonesia sekarang ini adalah suatu 'krisis multikompleks', sekalipun semula yang nampa di permukaan hanyalah krisis moneter. Karena itu,terasa janggal di telinga saya jika mendengar bahwa masih saja ada sebagian ekonom kita yang bersikukuh bahwa yang kita alami ini semata-mata hanyalah krisis moneter. Krisis ekonomi pun bukan,katanya, apala multikompleks. Kalau sektor moneter teratasi,semuanya bakal bere

2. Mungkin saja benar kalau yang dimaksud adalah pada tataran konse teoretis,yang memang dibedakan antara "moneter" dan "ekonomi".Ta yang jelas,secara awam saja, sektor moneter toh merupakan bagian

dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Jadi, kalau toh tak boleh di sebut kompleks, setidaknya krisis sekarang ini adalah krisis ekonomi.

3. Sudah kita ketahui bersama bahwa dalam sistem ekonomi 'moderen'(pasar-bebas,kapitalistik,atau apapun namanya), krisis ekonomi dan/atau resesi akan selalu terjadi secara periodik, setiap sekian tahun. Macam-macam teori telah berusaha untuk menjelaskan hal itu,dengan tujuan agar dapat mengantisipasi, mengatasi, dan kalau mungkin menghindarinya. Namun kenyataannya sampai sekarang tetap saja itu terjadi. Mengapa? Karena ada satu faktor yang banyak diabaikan orang.

4. Menurut Fred Harrison (1983) -- yang melakukan studi mengenai krisis-krisis ekonomi yang pernah terjadi sepanjang sejarah, di berbagai negara --, sumber krisis yang paling utama adalah adanya praktek monopoli tanah dan spekulasi tanah . Mengapa spekulasi tanah? Karena tanah diperlakukan sebagai komoditi ! Tapi, apa salahnya ?

5. Adalah wajar bahwa dalam sistem pasar bebas, semua hal dapat diperlakukan sebagai komoditi (yaitu barang dagangan yang diperjual-belikan semata-mata demi keuntungan). Modal, tenaga kerja,keterampilan,iptek,dll sekarang menjadi komoditi. Adalah wajar pula bahwa dalam sistem pasar-bebas, semua komoditi bisa dan boleh diperdagangkan secara spekulatif, karena toh resikonya ditanggung sendiri oleh si spekulan. Bahkan uang pun yang semula sekedar sebagai 'alat-tukar',sekarang menjadi komoditi yang dijadikan permainan spekulatif. Jika demikian, apakah 'sistem pasar-bebas' itu sendiri yang menjadi sumber malapetaka ? Bukan! Kata Fred Harrison.

6. Pasar bebas tetap diterima. Tetapi, dengan catatan : khusus mengenai tanah, negara perlu melakukan intervensi guna mencegah terjadinya spekulasi tanah. Sebab,menurut Harrison, tanah mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh komoditi-komoditi lain. Ciri khusus inilah yang mendorong spekulasi. Sebab, bagi spekulan, tidak sama seperti dalam spekulasi komoditi lain, spekulasi tanah hampir tidak mengandung resiko. Namun dampak buruknya justru melanda secara makro keseluruhan ekonomi nasional.

7. Spekulasi menyebabkan harga tanah makin lama makin tinggi, sampai mencapai puncaknya yang 'menggila'. Lonjakan harga tanah yang 'gila' itu tak dapat dijelaskan dengan argumen sederhana yang ada dalam teori pasar. Lalu Harrison menelusuri liku-liku beroperasinya praktek spekulasi tanah. Dampak buruk spekulasi tanah itu bersifat ganda : petani tergusur (yang berarti kehilangan pekerjaan di bidang pertanian), sedangkan, dengan berbagai alasan, tanah yang telah terbebaskan itu oleh spekulan/developer sengaja diterlantarkan untuk beberapa tahun. Tanpa resiko,tanpa pengeluaran yang berarti, tinggal menunggu, si spekulan mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan naiknya harga. Itu berarti, di satu sisi kesempatan kerja bagi buruh bangunan hilang, sedang di sisi lain, potensi tanah bagi produksi pertanian pun tak termanfaatkan. Karena proses spekulasi itu berantai dan meluas, maka secara nasional, produksi menjadi tidak optimal, sementara itu pengangguran meningkat. Setelah harga tanah mencapai puncaknya, maka melalui proses rumit (menyangkut kegiatan ekonomi lainnya) selama 1-3 tahun,terjadilah krisis ekonomi. Data makro juga menunjukkan bahwa setiap krisis yang pernah terjadi (krisis tahun 1819; 1837; 1857; 1873; 1893; 1918; 1929; dst), selalu didahului oleh memuncaknya harga tanah, satu sampai tiga tahun sebelumnya. (Tentang ciri khas tanah sebagai komoditi, lihat, G.Wiradi,1996; Untuk uraian yang lebih lengkap, lihat, Fred Harrison,1983 : Ch.5;8;dan 10).

8. Bagaimana di Indonesia ?? Sebenarnya, "warning" mengenai akan terjadinya krisis ini sudah sejak lama diberikan oleh banyak orang,termasuk dari saya sendiri. Sumber krisis: pertama, kebijakan deregulasi perbankan--cenderung mengarah 'capital flight' (G.Wiradi,1991);kedua, memperlakukan tanah sebagai komoditi (G.Wiradi,1996). Terbukti,sekarang menjadi kenyataan !!

III. PEMBARUAN AGRARIA

1. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa dalam masa pemerintahan Orde Baru selama ini, perhatian terhadap masalah pertanahan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat,semakin lama semakin hilang. Benar bahwa berbagai diskusi,seminar, dan perdebatan mengenai UUPA, mengenai ber macam sengketa tanah,dsb pernah cukup marak dan hangat. Namun minat untuk memikirkan dan berketetapan untuk melakukan pembaruan agraria

dalam arti yang sebenarnya, dapat dikatakan semakin hilang. Kalau pun ada, tak jelas arahnya! Bahkan yang dilakukan adalah 'pembaruan' yang justru memberi peluang bagi terjadinya spekulasi tanah.

2. Sekarang ini,masalah pertanahan kita sudah begitu semrawut. "Nasi sudah menjadi bubur". Apalagi ditimpali dengan datangnya krisis yang belum jelas bagaimana 'akhirnya'. Dalam kondisi demikian,kalau ditanyakan apa yang bisa dilakukan dalam jangka pendek, terus terang saya tidak dapat menjawabnya. Karena menurut pendapat saya, langkah-langka yang nampaknya pragmatis tapi tergesa-gesa, justru bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi baru di belakang hari seperti pengalaman kita selama ini. Karena itu, kita perlu berusaha untuk membangun gagasan-gagasan baru, kita olah bersama secara terus-menerus, sehingga dapat menjadi semacam 'grand design' yang bisa dijadikan acuan bagi langkah langkah selanjutnya.

3. Apa yang bisa saya tawarkan saat ini barulah sebuah gagasan yang masi samar-samar, yang pernah saya lontarkan dalam Munas KPA pertama, yait apa yang disebut "Reform-By-Leverage" (RBL). Selama ini,yang terjadi dalam sejarah adalah "Reform-By-Grace"(RBG), yaitu suatu pembaruan yang datang dari atas, dari "kedermawanan" pemerintah. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa hampir semua RBG, baik gaya kapitalis maupun gaya sosialis ternyata belum berhasil mengangkat kesejahteraan petani dan rakyat umumnya.(Rationale di belakang gagasan RBL, lihat G.Wiradi dalam Dianto Bachriadi,dkk.(eds), "Reformasi Agraria", diterbitkan oleh KPA bekerjasama dengan Lembaga Penerbit FEUI, 1997).

4. Substansi RBL memang masih harus dikembangkan karena memang masih samar-samar. Yang jelas RBL adalah suatu gerakan pembaruan agraria mels lui pemberdayaan rakyat, yang berarti dilandasi oleh perjuangan untuk menegakkan demokrasi. Hanya dalam suasana demokratis yang memberi kekebebasan berserikat lah, petani dan rakyat umumnya dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keberdayaannya dalam wujudnya yang bukan saja formal dan legal, tapi juga nyata.

DAFTAR ACUAN

1. CHODAK, Szymon (1979): Societal Development.
Oxford University Press. New York.

2. GUNAWAN WIRADI (1991): 'Pembentukan Modal Di Pedesaan'.
Project Working Paper Series no.A-24
PPLH-ITB--PSP-IPB--ISS The Hague.

3. GUNAWAN WIRADI (1996): "Jangan Perlakukan Tanah Sebagai Komoditi",
dalam Jurnal Analisis Sosial,no.3,Juli 1996
Yayasan Akatiga,Bandung.

4. HARRISON,Fred (1983): The Power in The Land
Shepheard-Walwyn (Publishers) Ltd. London.

5. DIANTO BACHRIADI,dkk(eds) : Reformasi Agraria
KPA bekerjasama dengan Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Jakarta.

AKATIGA
PUSAT ANALISIS SOSIAL
JL. TURANGGA [illegible] NO. 2 BANDUNG [illegible]
TELP. (022) 2502202 FAX. 2505804